

## **SAMBANDHA DALAM BEBERAPA PRASASTI BALI**

**Oleh : I GUSTI PUTU EKAWANA**

### **I. PENDAHULUAN.**

Di kalangan para terpelajar tentu sudah pernah mendengar perkataan prasasti. Lebih-lebih lagi di kalangan pencinta sejarah, sejarah kuna khususnya. Yang dimaksud dengan prasasti ialah sumber-sumber sejarah dari masa lampau yang ditulis di atas batu atau logam. Sebagian terbesar dari prasasti-prasasti tersebut dikeluarkan oleh raja-raja yang memerintah di berbagai kepulauan Indonesia sejak abad ke 5 (Boechari, 1977: 2).

Dari prasasti dapat diketahui bermacam-macam hal seperti nama raja, nama-nama pejabat kerajaan, data pertanian, peternakan, bangunan-bangunan suci dan sebagainya. Beberapa sarjana telah menulis topik pembicaraan dengan memanfaatkan prasasti sebagai sumber penulisan. Misalnya Machi Suhadi menulis sistim perpajakan di dalam prasasti Jawa Kuna (Machi Suhadi, 1978), Riboet Darmosoetopo menulis tentang pergantian tahta kerajaan Indonesia Kuna (abad 4-11 M) (Riboet Darmosoetopo, 1980: 52-57), Ida Bagus Purwita menulis tentang subak dalam lintasan sejarah Bali (Purwita, 1981: 29-33) dan banyak karangan lainnya lagi yang dimuat dalam majalah-majalah maupun makalah yang dibawakan dalam seminar.

Sebagaimana halnya dengan Negara Republik Indonesia di dalam mengeluarkan suatu peraturan maupun undang-undang baik oleh pemerintah pusat maupun daerah ada tujuan dan latar belakangnya. Demikian pula keluarnya surat keputusan tentu ada pula latar belakangnya yang menyebabkan diambilnya keputusan itu. Begitu pula dalam jaman kerajaan Indonesia Kuna suatu desa atau seseorang diberi anugerah prasasti ada latar belakangnya. Suatu desa atau seseorang mendapat anugerah prasasti masing-masing mempunyai alasan tersendiri. Jelasnya masing-masing prasasti mempunyai perbedaan isi.

Pada kesempatan ini akan dicoba untuk menguraikan secara singkat masalah tentang sebab-sebab prasasti dianugerahkan oleh raja. Berdasarkan pembacaan pada beberapa prasasti Bali sebab-sebab atau alasan suatu desa mendapat anugerah prasasti ada secara jelas disebut latar belakangnya tetapi ada pula yang tidak disebutkan.

Di dalam prasasti alasan atau sebab-sebab suatu prasasti dikeluarkan oleh raja dapat diketahui pada bagian yang memuat **sambandha**. Pada **sambandha** inilah kita dapat mengetahui latar belakang suatu **karāman** mendapat anugerah prasasti. Kalau kita perhatikan **sambandha** prasasti itu bermacam-macam antara lain, menyebutkan tentang masalah **bwatthaji**, **buñcang haji** berupa pajak yang dirasakan berat, ingin menjadi desa berdiri sendiri (merdeka), penduduk berkurang karena banyak yang mati dan ditawan musuh sehingga merasa berat memikul beban pajak, merasa berat mengerjakan kebun milik raja, mempersembahkan **sima** untuk bangunan suci dan sebagainya. Dengan bermacam-macam latar belakang itu sebagai alasan atau sebab-sebab seorang raja lalu menganugerahkan prasasti setelah melalui sidang lengkap kerajaan. Prasasti merupakan pegangan (**agēmmagēm**) untuk mengokohkan kedudukan satu **karāman**. Menurut Goris prasasti adalah merupakan undang-undang (Goris, 1948: 22). Oleh karena itu jelaslah bahwa prasasti sebagai undang-undang, merupakan dasar hukum yang dipergunakan sebagai pegangan (**agēmma-gēm**) yang memuat hak-hak dan kewajiban bagi sebuah **karāman** yang harus ditaati oleh semua pihak.

Kalau kita perhatikan arti perkataan **sambandha** dapat berarti bermacam-macam seperti: 'ikatan, hubungan, hubungan/derajat keluarga, tumbuh, sebab, musabab, lantaran, karena, sudah waktunya untuk, seolah-olah, semestinya' (Mardiwarsito, 1981: 498). Dari sejumlah arti perkataan itu kiranya tidak dapat diartikan secara kaku dengan satu perkataan saja melainkan dapat berubah-ubah menurut konteks kalimat prasasti. Di dalam menafsirkan arti perkataan **sambandha** tersebut kiranya yang sesuai untuk dipergunakan adalah 'sebab, musabab, lantaran'. Di samping berarti seperti di atas ini dapat pula ditafsirkan dengan 'maksud, tujuan, alasan'.

Sebagai suatu karangan yang membicarakan salah satu aspek prasasti seharusnya dapat menguraikan secara terperinci tetapi pada karangan ini sangat jauh dari pada itu. Di sini tidak akan disebutkan semua **sambandha** dari prasasti Bali melainkan hanya diambil beberapa saja sebagai contoh. Demikian pula pembahasan yang dilakukan hanya sepiantas saja sehingga lebih tepat dikatakan sebagai suatu pengantar ke arah penelitian lebih lanjut.

## II. DATA PRASASTI

Seperti telah disinggung pada uraian di muka bahwa tidak akan dikemukakan semua **sambandha** pada prasasti Bali tetapi dipakai beberapa saja sebagai contoh. Dari sejumlah prasasti yang telah dibaca ternyata prasasti itu **sambandhanya** bermacam-macam. Dari sejumlah prasasti yang dipakai contoh beberapa di antaranya **sambandhanya** tidak jelas menyebut latar belakang masalah yang dihadapi oleh penduduk atau **karāman**. Sebagai gambaran dari **sambandha** dikemukakan sebagian kutipan prasasti yang memuat bagian yang penting dari prasasti itu. Untuk lebih melengkapi uraian di bawah ini diberikan pula terjemahan terhadap kutipan pra-

sasti tersebut. Adapun kutipan dari bagian prasasti yang memuat **sambandha** seperti di bawah ini.

1. Prasasti Serai A II (Goris no. 302), bertahun Śaka 915, dikeluarkan oleh raja suami-istri Gunapriya Dharmapatni dan Udayana.
  - Ila. 4. sambandha, hentwa mabwatthaji di buru matahi
  5. lang dr̥wya haji pangrotña māsu 9 hatmwang hatwamwang di nayakaña, kunang pwan tani pamriḥ tumahilang hentwa māsu 9 . . . . . (Goris, 1954: 81).

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

- Ila. 4. 'lantaran orang-orang yang melakukan **bwatthaji**.<sup>1</sup> di Buru, membayar **dr̥wya haji**.<sup>2</sup> (berupa) pajak **rot**.<sup>3</sup> 9 **māsu** setiap tahun kepada **nayakan**.<sup>4</sup>nya, oleh karena tidak dapat memenuhi membayar sebesar 9 **masu** . . . . .'
2. Prasasti Bwahan A (Goris no. 303), bertahun Śaka 916, dikeluarkan oleh raja suami-istri Gunapriya Dharmapatni dan Udayana.
  - I. 6. kunang sangkā ri hyun ikang karāmān i wing kang ranu bwahan sumehakna śarintēnya, ma
  7. ryya salapkna mwang ikang karāmān i wingkang raṇu kdisan, yāthanyan sutantrā i kāwakanya, matangnyan panambah ikang kārāman i wingkang raṇu
  8. bwahan i haji sajalustri, mahyang anugraha aminta praṣaṣṭi . . . . . (Goris, 1954: 83).

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

- I. 6. . . . ., oleh karena keinginan **karāmān**.<sup>5</sup> tepi danau Bwahan hendak memisahkan badannya
  7. berhenti (bergabung) secara musyawarah (baik-baik) dengan **karāmān** tepi danau Kdisan, supaya bebas berdiri sendiri (merdeka) karena itu datang menyembah **karāmān** tepi danau
  8. Bwahan dihadapan raja suami-istri memohon anugerah meminta prasasti, . . . . .
3. Prasasti Sembiran A III (Goris no. 351), bertahun Śaka 938, dikeluarkan oleh Sang Ratu Śrī Sangājñādevī.
    - VIa. 3. . . . ., makatahwang ram paraspara uraña habanwa,
    4. mati, me tyaban musuh, nguniweh lwas majēngan di banwa johan, kawkas ta ya kuṇ 50 ghyāni, mula kuṇ 300 kunang sangka ri tani pra
    5. h misinin to drabyahajiña sḍangña paripūrṇa tkā di halyun buñcang haji saprakāra, ya ta mangjadyang sakit kepwan di ya, ya ta haitu na ma
    6. nambah di sang ratu, mangidhih anugraha titisyānambrta, . . . . . (Goris, 1954: 95).

Terjemahannya lebih kurang seperti berikut:

- Vla. 3. . . . ., memberitahukan musyawarah tentang kekacauan seluruh desa,
4. (karena) mati dan ditawan musuh, lebi-lebih lagi pergi ber-lindung (**majĕngan?**) di desa berjauhan (**johan**), akhirnya se-karang bersisa 50 keluarga, pada mulanya 300 keluarga. Oleh karena tidak mampu
  5. mengisi (membayar) **drabyahajiña** secara lunas pada waktu-nya, sampai dengan segala macam **buñcang haji**.<sup>6</sup> hal itu menjadikan sakit hati mereka (penduduk) itulah sebabnya
  6. menyembah kehadapan baginda raja memohon tetesan **ambṛta** (air untuk hidup) . . . . .
4. Prasasti Batuan (Goris, no. 352) bertahun Śaka 944, dikeluarkan oleh raja Śri Dharmawangśawardhanamarakapangkajasthānottungga-dewa.
- Ib. 4. . . . ., makasambanda, majarakĕn bhara ni buñcang ha-jinya makmitan kebwan pāduka haji sang siddha dewata lu-mah ring nger wka, ing nger paku, . . . . (Goris, 1954: 96).

Terjemahannya lebih kurang seperti di bawah ini:

- Ib. 4. . . . ., bermaksud (dengan alasan) menyampaikan berat-nya **buñcang haji**-nya menjaga kebun baginda raja yang te-lah menjadi dewa (mencapai alam dewa) yang dicandikan (**lumah?**) di Er Wka, di Er Paku, . . . . .
5. Prasasti Sawan A I = Bila A I (Goris, no. 353), bertahun Śaka 945 dikeluarkan oleh raja Dharmawangśawardhanamarakatapangkajas-thanottunggadewa.
- Ib. 2. . . . ., sambandha majaraken paraspara ni hambanya saka-rāman mula 50 kuṛn kweḥnya nguni ring muhun mala
3. ma, maśeśa ta ya 10 kuṛn, kunang sangkā ri kabyetanya ring drwya haji, mwan buñcang haji magongadmĕt, tka ring pinta palaku pamli, pikupikulan, . . . . (Goris, 1954: 101).

Terjemahannya lebih kurang sebagai di bawah ini:

- Ib. 2. . . . ., adapun sebabnya (mereka menghadap) menyampai-kan hasil musyawarah yang semula (penduduk) banyaknya 50 keluarga jumlahnya dahulu
3. (kinĕ) bersisa hanya 10 keluarga, oleh karena beratnya **drwya-haji** dan **buñcang haji** besar maupun kecil, termasuk pula **pinta palaku pamli**.<sup>7</sup> pikul-pikulan, . . . . .
6. Prasasti Trunyan A II (Goris, no. 402), bertahun Śaka 971, dikeluarkan oleh raja Anak Wungśu.
- IVb. 2. . . . ., sambandha ni panambah nikāng karāman i turuñan sapasuk thāni, ri paduka haji, anghyang amintanugraha, an pagĕhakna sarasani prasāsti

3. nya mūla atēhēr tambrakna, makanimitta wuk riptanya, ya ta karananyan anghyang anambah ri pāduka haji, . . . . . (Callenfels, 1926: 22).

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

- IVb. 2. . . . ., sambandha ni panambah nikāng karāman i turuñan sapaasuk thani, ri paduka haji, anghyang amintanugraha, an pagehākna sarasani prasāsti
3. nya mūla atēhēr tambrakna, makanimitta wuk riptanya, ya ta karananyan anghyang anambah ri pāduka haji . . . . . (Callenfels, 1926: 22).

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

- IVb. 2. . . . ., berdasarkan alasan menyembahnya **karāman** di turunan dengan seluruh wilayah (penduduk) dihadapan baginda raja, memohon meminta anugerah untuk mengokohkan isi maksud (inti) prasasti
3. yang dulu, selanjutnya disalin pada tembaga, oleh karena rusak **riptanya** (rontalnya), itulah sebabnya memohon, menyembah dihadapan baginda raja, . . . . .
7. Prasasti Pandak Bandung (Goris, no. 436) bertahun Śaka 993, dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu.
  - Ib. 2. . . . ., umarpanakēn, ikang sima marajang mapakna punpunan sanghyang dharmma ring ngantakunjarapāda, sambandha dinwal tkap i wka wet sang atita prabhu lumah ing senāmukha, mangara
  3. n dyah jaśa mwa dyah manali, dyah citta, ring mā su 5 i lwu ni pāduka haji, tke alasnya sawahnya parlaknya, agaduh manarimakēn pirak samgat ser camalagi mangaran maholka, . . . . . (Callenfels, 1926: 14).

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

- Ib. 2. . . . ., mempersembahkan **sima**<sup>8</sup> Marajang diperuntukkan bagi **punpunan**<sup>9</sup> **sanghyang dharmma**<sup>10</sup> di Antakunjarapāda, lantaran (berdasarkan alasan) dijual oleh keturunan raja yang lampau yang **lumāh** di Senāmukha, bernama
3. Dyah Jaśa, Dyah Manali dan Dyah Citta, seharga 5 **mā su** dihadapan debu baginda raja serta hutan dan sawahnya, kebunnya, bertindak membayarkan **pirak** (uang perak) **samgat ser camalagi**<sup>11</sup> bernama Maholka . . . . .
8. Praasasti Pura Pamrajan Raja Purana = Klungkung A (Goris, no. 439) bertahun Śaka 994, dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu.
  - Ib. 2. . . . ., sambandhāhyūn gumawaya ikanang sawah kaḍandan i kaswakan rawas kramanya pina:
  3. lakunya lāga pariduh manahura sapurwwasantātinya mula ma 5 saputhayu, . . . . . (Callenfels, 1926: 60).

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

Ib. 2. . . . . , berdasarkan alasan (sebab) ingin membuat sawah **kaḍandan**<sup>12</sup> di **kaswakan**.<sup>13</sup> Rawas, yaitu perihal dikenakan biaya

3. **lāga pariduh**.<sup>14</sup> supaya membayar kembali seperti peraturan semula yalah sebesar 5 **ma** setiap orang, . . . . .

9. Prasasti Bwahan C (Goris, no. 554) bertahun Śaka 1068, dikeluarkan oleh raja Jayaśakti.

Ib. 4. . . . . , sambandha ni panambah hikanang karāman i wingkang raṇu maser i lbū ni padūka śri mahārāja, majarakēn susahnyangēnangēnya maka ni

5. mitta pinuripurihan dening cakṣu paracakṣu, kinditan wineh umagēhakēn sapūrwwāsthitinya ri lāgi, . . . . . (Callenfesl, 1926: 33).

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

Ib. 2. . . . . , lantaran menyembahnya **karāman** tepi danau (Bwahan) dengan tertib dihadapan debu Paduka Sri Maharaja menyampaikan tentang pikiran yang susah

5. oleh karena dipermainkan (diperdayakan) oleh cakṣu paracakṣu.<sup>15</sup> (mohon) diberi pegangan (prasasti) untuk mengokohkan sebagai semula sejak dahulu, . . . . .

10. Prasasti Tejakula (Goris, no. 571) bertahun Śaka 1077 dikeluarkan oleh raja Rāgajāya.

Ib. 2. . . . . , sambandhā ni pangalocitanira, umingētingēt ikang karāman anung yogya kaparnaha jātaka bhaṭā

3. ra ri kuñjarāsana, makahetu ri tan angganira majātaka katunggnah anghuningi ri bhaṭāra, matangnyan inundang karamani sabhaya sapañjing thani, datang ta ya mampakampak akrigan mapulung

4. rahi umaturi lbuni paduka śri mahārāja, . . . . . (Ginarsa, 1974: 14).

Terjemahannya lebih kurang sebagai di bawah ini:

Ib. 2. . . . . adapun maksud dari pertemuan baginda itu, untuk mengingat-ingatkan desa manakah yang layak ditempatkan di wilayah tanah suci (**jātaka**).<sup>16</sup>

3. milik Bhaṭāra.<sup>17</sup> di Kunjarāsana. Apabila mereka tidak setuju (ingin) ditunjuk untuk mengerjakan tanah **jātaka** itu supaya melaporkan dihadapan Bhaṭāra. Dari sebab itulah **karaman** Sabhaya dengan seluruh penduduk (wilayah) dipanggil (oleh raja). Maka datanglah mereka serentak berduyun-duyun tidak ada yang ketinggalan

4. bertatap muka menyembah debu Paduka Sri Maharaja, . . . . .

11. Prasasti Campaga A (Goris, no. 631) bertahun Śaka 1103 dikeluarkan oleh raja Jayapangus.

- Ib. 4. . . . ., sambandha mangrēngö pāduka śri mahārāja, ri katidopaya ni  
5. kang karāman, epu kapgan, tan wringdāya alah holahālěh mawicara lawan sang admak akmitan a pigājih, angkěn cetramāsa, ya ta du  
6. madyakěn trasantasah nikang karāman jmur, tan pahāmngan, . . . . . (Callenfels, 1926: 46).

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

4. . . . ., berdasarkan alasan (sebab) Paduka Sri Maharaja, mendengar tentang keragu-raguan (kebingungan) tidak tahu daya upaya  
5. **karamān** (Campaga) sesak kebingungan, tidak tahu daya upaya, lemah tidak dapat berbuat apa berdebat (berbicara) dengan sang **admak akmitan apigājih**,<sup>18</sup> setiap bulan **Cetra**.<sup>19</sup>, itulah sebabnya  
6. menjadikan tidak teraturnya **karāman**, hancur tidak terlindungi, . . . . .
12. Prasasti Hyang Putih (Goris, no. 803) bertahun Saka 1246, dikeluarkan oleh raja Bhaṭāra Guru II.  
Ib. 3. . . . ., i pingsornya ājñā pāduka śri mahārāja hajarěn sira kabeh ri gatidopaya nikanang ka  
4. raman ing hyang putih sapañjing thāni, . . . . .<sup>20</sup>

Terjemahannya lebih kurang sebagai berikut:

- Ib. 3. . . . ., adapun isi yang termaktub di dalam perintah Paduka Sri Maharaja yang harus dititahkan kepada beliau semuanya, yaitu mengenai kesusahan (keragu-raguan dalam segala upaya)  
4. **karaman** di Hyang Putih dengan seluruh penduduknya (wilayahnya) . . . . .
13. Prasasti Campaga C (Goris, no. 804) bertahun Saka 1246 dikeluarkan oleh raja Bhaṭāra Guru II.  
Ib. 5. . . . ., ri gatinikanang karaman ing cāmpaga, ingu  
6. sikusik deni karaman ing tumpuhyang, wkasan rinampas tinunon pomahanya, hěnti tke hingonhingonya kabaiḥ tinawan deni ka  
IIa. 1. rāman ing tumpu hyang, lunga ta ya alěslěsan maring desa salen, karungu pwa ya denira pāduka bhaṭāra śri mahāguru, i karāman ing cāmpaga sah ri pa  
2. nagaranya ingawasakěn ta ya ri desanya tuhu ru sakkāsamun tan hana katmu wwangnya salah tunggal . . . . (Callenfels, 1926: 50)

Terjemahannya lebih kurang seperti di bawah ini:

- Ib. 5. . . . ., mengenai kesusahan **karāman** di Campaga,  
6. diganggu oleh **karāman** Tumpuhyang kemudian dirampas dan dibakar rumahnya sampai habis semua binatang piaraanya ditawan oleh
- Ila. 1. **karāman** Tumpuhyang, pergilah mereka lari ketakutan ke desa lain. Didengarlah mereka oleh Paduka Bhaṭara Śri Mahāguru bahwa **karāman** di Campaga mengungsi dari  
2. desanya. Dilihatlah desanya betul-betul rusak dan kosong tidak dijumpai salah seorangpun penduduknya (orangnya), . . .

### III. URAIAN SINGKAT.

Memperhatikan data pada beberapa prasasti di atas dapat diketahui bahwa masing-masing prasasti mempunyai **sambandha** yang berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan **sambandha** prasasti tersebut maka jelas dapat diketahui adanya latar belakang perbedaan masalah yang dihadapi oleh masing-masing **karāman**. Masalah yang dihadapi oleh **karāman** atau penduduk itulah kemudian disampaikan kepada raja. Dalam hal ini dapat pula kita ketahui bahwa segala permasalahan yang dihadapi oleh **karāman** atau penduduk semuanya diketahui oleh raja. Melalui persidangan lengkap di istana (**ri pakira-kirān i jro makabehan**) masalah itu diselesaikan sebagaimana mestinya dan akhirnya raja membuat keputusan yang kemudian dituangkan dalam bentuk prasasti. Pada umumnya masalah yang dihadapi oleh **karāman** atau penduduk dicantumkan pada prasasti yang dimuat pada bagian **sambandha**.

Menurut keterangan M.M. Sukarto K. Atmojo bahwa bagian **sambandha** merupakan bagian yang penting karena dengan demikian akan dapat mengetahui alasan atau sebab apakah raja mengeluarkan prasasti. Tetapi penyebutan istilah **sambandha** umumnya hanya terbatas pada prasasti yang cukup panjang sedangkan prasasti pendek lainnya tidak menerangkan secara jelas, meskipun penulisan sebuah prasasti pasti berkaitan dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan prasasti yang panjang kerap kali tidak menyebut **sambandha** (Sukarto K. Atmojo, 1981: 14). Apa yang dikemukakan di atas ini memang demikian adanya, karena dengan sejumlah contoh yang kami kemukakan di atas ada yang menyebut **sambandha** dengan jelas dan ada pula yang tidak menyebut **sambandha** secara jelas latar belakang masalahnya.

Berdasarkan contoh tersebut di muka **sambandha** prasasti itu menyebutkan beraneka ragam permasalahan dari masalah pajak (**dr̥wyahaji**), **bwatthaji**, dan **buñcang haji**, ingin menjadi desa berdiri sendiri, tanah pertanian (**jatāka**, **sīma** dan membuat sawah baru) perampokan/perampasan, perbuatan curang para petugas kerajaan (**sang admak akmitan apigājih**, **cakṣu paracakṣu**), ingin mengganti **ripta** yang sudah rusak dan sebagainya kesemuanya itu merupakan latar belakang masalah terbitnya prasasti. Permasalahan itu diketahui oleh raja serta perangkat kerajaan yaitu para



**tanda rakryan** (para pendeta agama Siwa dan agama Budha, **senapati**, **semangat/samgēt** dan sebagainya).

Mengenai masalah pajak (**drwyahaji**), **buñcang haji** dan **bwatthaji**, sebagai latar belakang masalah disebutkan pada prasasti Serai A II (Goris, no. 302), Sembiran A III (Goris, no. 351), dan Sawan (Goris, no. 353). Pada prasasti Serai A II disebutkan orang-orang yang sudah melakukan **bwatthaji** di Buru juga dikenakan **drwyahaji** setiap tahun sebesar 9 **māsu** tetapi mereka tidak dapat membayar pajak **rot** itu. Sedangkan pada prasasti Sembiran A III disebutkan sebagai pangkal masalah berkurangnya jumlah penduduk yang pada mulanya berjumlah 300 keluarga bersisa hanya 50 keluarga karena ada yang mati, ditawan musuh serta ada yang mengungsi ke tempat lain, sehingga penduduk yang tinggal sedikit itu tidak dapat membayar **drabyahaji** (**drwyahaji**) sampai dengan **buñcang haji**, hal itu menyebabkan mereka sakit/susah hati. Masalah yang serupa dengan yang disebutkan pada prasasti Sembiran A III juga disebut pada prasasti Sawan, bahwa penduduk yang pada mulanya berjumlah 50 keluarga tinggal bersisa 10 keluarga sehingga mereka merasa berat untuk membayar **drwyahaji** serta melakukan **buñcang haji** besar maupun kecil termasuk **pinta palaku pamli** dan pikul-pikulan.

Gambaran lain yang ditemukan pada prasasti Sembiran A III adanya gangguan keamanan terhadap penduduk berupa tindak kekerasan seperti pembunuhan, penawanan dan juga menyebabkan terjadinya pengungsian. Barangkali berkurangnya jumlah penduduk seperti yang disebut pada prasasti Sawan diakibatkan oleh tindak kekerasan juga. Sayang sekali kami tidak dapat mengetahui siapakah yang dikatakan musuh dalam prasasti Sembiran A III itu. Berlainan halnya keterangan yang kami peroleh pada prasasti Campaga C (Goris, no. 804) bahwa kesusahan **karāman** Campaga karena diganggu oleh **karāman** Tumpuhyang disertai dengan pembakaran rumah penduduk, perampasan hak milik dan penawanan terhadap binatang piaraan serta penduduk semua mengungsi ke desa lain. Dalam masalah ini raja Bhaṭāra Śri Mahāguru (Bhaṭāra Guru II) langsung mengadakan pemeriksaan terhadap **karāman** Campaga dan menjumpai **karāman** Campaga betul-betul kosong tidak ditemukan seorang pendudukpun. Kemudian raja memerintahkan supaya pulang ke rumahnya masing-masing. Sebagai tindak lanjut akibat dari gangguan **karāman** Tumpuhyang itu **karāman** Campaga dipisahkan dengan **karāman** Tumpuhyang menjadi desa berdiri sendiri.

Bila dalam prasasti Campaga C disebutkan raja memisahkan **karāman** Campaga dengan **karāman** Tumpuhyang sebagai tindak kekerasan dari **karāman** Tumpuhyang, pada prasasti Bwahan A (Goris, no. 303) tidak disebutkan latar belakangnya mengapa **karāman** tepi danau Bwahan ingin memisahkan diri dari **karāman** tepi danau Kdisan. Dalam usahanya untuk memisahkan diri untuk mereka (**karāman** tepi danau Bwahan) dengan cara

baik-baik (musyawarah) memohon kehadiran raja supaya diijinkan menjadi desa berdiri sendiri serta memohon prasasti. Permohonan prasasti ini dapat dimaklumi yaitu sebagai bukti pengesahan (penetapan) bahwa **karāman** tepi danau Bwahan telah berdiri sendiri tidak terikat lagi dengan **karāman** tepi danau Kdisan. Walaupun pada prasasti tidak disebutkan alasan **karāman** tepi danau Bwahan memohon kepada raja untuk memisahkan diri dengan **karāman** tepi danau Kdisan dapat dipastikan ada sebab-sebabnya. Kiranya sebab-sebab itu dipandang tidak perlu ditonjolkan dalam prasasti yang mungkin akan dapat menimbulkan suatu masalah, mengingat antara kedua **karaman** itu letaknya berdampingan.<sup>21</sup>

Prasasti yang **sambandha**-nya yang mempunyai latar belakang masalah yang ada sangkut-pautnya dengan tanah pertanian ialah prasasti Batuan (Goris, no. 352), Pandak Bandung (Goris, no. 436), Klungkung A (Goris, no. 439) dan Tejakula (Goris, no. 571). Prasasti Batuan menyebutkan bahwa **karāman** Baturan merasakan beratnya **buñcang haji** menjaga kebun baginda raja yang **lumah** (dicandikan) di Er Wka (Udayana) dan di Er Paku (?). Dari prasasti itu dapat pula diketahui bahwa kedua tempat **lumah** (candi) bagi raja yang sudah mencapai alam dewa (**dewata**) mempunyai tanah **laba pura (jatāka)** berupa kebun yang hasilnya dipergunakan untuk memelihara bangunan itu. Berbicara masalah tanah kebun adalah tanah pertanian yang tidak memerlukan pengairan. Hanya saja kita tidak mengetahui berupa perkebunan apa milik raja yang **lumah** di Er Wka dan di Er Paku itu. Sedangkan pada prasasti Pandak Bandung disebutkan bahwa raja (Anak Wungsu) mempersembahkan **śima** Marajang diperuntukkan bagi (dijadikan) milik **sanghyang dharma** di Antakuñjarapāda. Tanah (**śima** Marajang) itu pada mulanya dijual oleh keturunan raja yang lampau (almarhum) yang dicandikan di Senāmukha. Siapakah nama raja yang dicandikan di Senāmukha tidak kami ketahui dan di mana letak Senāmukha masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Seperti disebut dalam prasasti bahwa keturunan baginda yang dicandikan di Senāmukha bernama Dyah Jaśa, Dyah Manali dan Dyah Citta. Lebih lanjut disebutkan bahwa tanah **śima** itu terdiri atas hutan, sawah dan kebun. Mengapa hutan dimasukkan sebagai **śima** hal ini dapat dimaklumi karena hutan memberikan persediaan kayu yang diperlukan untuk bahan bangunan suci. Dengan disebutnya tanah sawah dapat kita ketahui bahwa sudah dikenal adanya bangunan pengairan. Pada prasasti Klungkung A disebutkan adanya keinginan membuat sawah yaitu sawah **kadandan** yang terletak di **kaswakan** Rawas. Sehubungan dengan pembuatan sawah itu setiap orang supaya membayar **lāga pariduh** sebesar 5 **ma** seperti peraturan yang berlaku sejak dahulu. Dalam hal pembuatan sawah baru, kiranya terlebih dahulu harus menyampaikan kepada raja tidak boleh dilakukan begitu saja. Mengapa harus disampaikan kepada raja? Hal itu dapat dimaklumi, sawah merupakan tanah pertanian yang lebih penting jika dibandingkan dengan tanah pertanian lainnya. Dalam hal pajak pada umumnya tanah sawah lebih besar dibandingkan tanah kebun. Menurut hemat kami pembuatan sawah baru ha-

rus memberitahukan terlebih dahulu kepada raja karena ada sangkut pautnya dengan masalah pajak. Pada prasasti Tejakula disebutkan bahwa raja menuniuk **karāman** Sabhaya untuk mengerjakan tanah **jatāka (laba pura)** milik bangunan suci Bhatāra Kunjarasana. Raja tidak begitu saja memerintahkan **karāman** Sabhaya mengerjakan tanah **jatāka** itu tetapi terlebih dahulu memanggilnya untuk bermusyawarah. Rakyat Sabhaya datang menghadap raja untuk mengadakan tatap muka untuk memusyawarahkan tentang pengerjaan tanah **jatāka**. Sayang sekali kita tidak mengetahui jenis tanah **jatāka** apakah berupa tanah sawah, atau kebun.

Prasasti Trunyan A II **sambandha**-nya menyebutkan hal yang lain jadi berbeda dengan yang telah dibicarakan di muka. Pada prasasti itu disebutkan tentang permohonan kepada raja untuk mengganti **ripta** (rontal) yang rusak dengan yang baru terbuat dari tembaga. Penggantian **ripta** yang telah rusak merupakan hal yang penting karena apabila dibiarkan tidak diganti tidak ada yang dipakai sebagai pegangan, sehingga mudah dipermainkan seperti yang disebut pada prasasti Bwahan C yang akan kami singgung kemudian. Prasasti merupakan benda yang sangat berharga bagi suatu **karāman** karena merupakan suatu pegangan (**agēm magēm**) yang dipakai untuk mengokohkan **sarintēn**-nya. Boleh dikatakan prasasti merupakan dasar hukum bagi sebuah **karāman** yang harus ditaati oleh semua pihak apakah itu rakyat biasa atau pejabat kerajaan baik dari kalangan atas sampai dengan yang terbawah.

Masalah persengketaan penduduk (**karāman**) dengan pejabat kerajaan dapat diketahui dari **sambandha** prasasti Bwahan C (Goris, no. 554) dan Campaga A (Goris, no. 631). Pada **sambandha** prasasti Bwahan C disebutkan bahwa **karāman** tepi danau Bwahan menghadap raja karena selalu dipermainkan oleh **cakṣu paracakṣu**. Mereka memohon kepada raja supaya diberi pegangan (prasasti) untuk mengokohkan kedudukannya semula yang diwarisi sejak dahulu. Pada **sambandha** prasasti Campaga A disebutkan raja mengetahui kesusahan **karāman** (Campaga) tidak tahu daya upaya, lemah tidak dapat berbuat apa berdebat (berbicara baik dan buruk) dengan **sang admak akmitan apigājih** setiap bulan **Cetra**, menyebabkan **karāman** tidak teratur (kacau) tidak ada yang melindungi. Oleh karena itu mereka kemudian menghadap raja.

Dari kedua **sambandha** prasasti di atas ini kita dapat mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari para pejabat kerajaan sehingga menimbulkan persengketaan dengan penduduk.

Sebagai salah satu contoh prasasti yang **sambandha**-nya tidak jelas adalah prasasti Hyang Putih (Goris, no. 803). Pada prasasti itu hanya disebutkan bahwa raja mengeluarkan perintah karena kesusahan (tidak tahu daya upaya) **karāman** Hyang Putih. Tetapi apa yang menyebabkan kesusahan itu tidak ada disebutkan dalam prasasti. Tetapi walaupun demikian dapat diduga pasti ada kaitannya dengan suatu masalah yang menyangkut **karāman** Hyang Putih.

#### IV. PENUTUP

Dari beberapa contoh yang dipergunakan sebagai sumber penulisan bahwa **sambandha** prasasti ada yang jelas disebutkan tetapi ada juga yang tidak menyebut **sambandha**. Berdasarkan uraian kami di atas maka untuk sementara dapat disimpulkan seperti di bawah ini:

1. Raja sebagai tokoh yang mengeluarkan prasasti mengetahui segala permasalahan yang dihadapi oleh penduduk (**karāman**).
2. Masalah yang dihadapi oleh masing-masing **karāman** berbeda yang dapat kita ketahui dari masing-masing **sambandha** prasasti.
3. Prasasti merupakan benda yang sangat berharga bagi satu **karāman** karena merupakan dasar hukum bagi **karāman** itu sebab prasasti harus ditaati oleh semua pihak.

#### CATATAN

1. Menurut Goris perkataan ini diterjemahkan dengan 'kerja rodi' (Goris, 1954a: 227).
2. **Drwya haji** berarti 'milik raja'. Yang dimaksud dengan **drwya haji** ialah segala milik raja yang harus diserahkan oleh penduduk berupa pajak, iuran, pungutan dan sebagainya untuk raja atau perbendaharaan kerajaan (Ekawana, 1980: 50).
3. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan **rot** tidak jelas. Bandingkan dengan bahasa Bali **panguwot** berarti 'uang penebus, uang pembelian' (Goris, 1954a: 298).
4. **Nayakan** berasal dari kata **nāyaka** (bahasa Sanskerta) berarti 'pemimpin, mandur' (Goris, 1954a: 278). Bila diperhatikan dari konteks kalimat prasasti adalah orang yang bertugas untuk mengawasi orang-orang yang melakukan **bwatthaji**.
5. **Karāman** berasal dari kata **rāma** berarti 'ketua desa' (Goris, 1954a: 295). Demikian pula de Casparis menterjemahkan dengan '**village authorities**' berarti 'ketua desa, pembesar desa' (de Casparis, 1956: 216). Dalam bahasa Bali terdapat perkataan **rĕrama** (baca: **rĕramĕ**) dipergunakan untuk menyebut ayah dan ibu. Kata **rāma** di samping berarti seperti di atas ini juga mempunyai pengertian untuk menunjukkan orang yang dihormati di desa karena kedudukannya sebagai pemuka masyarakat.  
**Karāman** mempunyai pengertian 'tempat para **rāma**' oleh karena itu dapat berarti 'desa dengan anggotanya para **rāma**' (Sukarto K. Atmodjo, 1970: 220-221; Sukarto K. Atmodjo, 1974: 11).
6. **Buñcang haji** oleh Goris diterjemahkan dengan 'kerja rodi' (Goris, 1954a: 229).
7. **Pinta palaku pamli**, mungkin semacam iuran yang harus diserahkan oleh penduduk.
8. **Sima** seharusnya ditulis **sīma** (bahasa Sanskerta) berarti 'batas' (Goris, 1954a: 308). Sumber yang lain memberikan keterangan bahwa

**sīma** (daerah perdikan) yaitu tanah bebas dari pajak. Berdasarkan penelitian dari 120 prasasti yang berisi penetapan **sīma**, paling banyak menyebutkan penetapan **sīma** untuk bangunan suci (Mardiwarsito, 1981: 530; Boechari, 1977: 94-95). **Sīma** Marajang yang disebut dalam prasasti Pandak Bandung itu jelas sekali diperuntukkan bagi bangunan suci Antakuñjarapada. Di Bali dewasa ini masih dikenal **laba pura** yaitu tanah (sawah atau kebun) milik pura di mana hasilnya dipergunakan untuk memelihara atau menyelenggarakan upacara pura tersebut.

9. **Punpunan** dapat berarti 'para bawahan, kepunyaan, milik, segala harta benda (pusaka)' (Mardiwarsito, 1981: 445). Menurut penelitian Pak Boechari dalam berbagai prasasti terdapat istilah **punpunan** dan **anśa** untuk menyebut **sīma**. Berdasarkan prasasti Tuhañaru yang berangka tahun 1245 Śaka atau 1323 M (O.J.O. LXXXIII) disimpulkan bahwa **punpunan** ialah **sīma** yang letaknya dekat dengan bangunan sucinya, sedangkan **anśa** ialah **sīma** letaknya jauh dari bangunan sucinya (Boechari, 1977: 95).
10. **Sanghyang dharmma** bila diuraikan secara kata demi kata ialah: **sang** adalah partikel penunjuk orang biasa maupun hormat; **hyang** berarti 'dewa atau dewata'; **sanghyang** juga berarti 'dewa atau menunjuk sesuatu yang dianggap suci, mulia', **sanghyang dharmma** berarti 'pemakaman suci' (Mardiwarsito, 1981: 229 dan 505). Boleh jadi **sanghyang dharmma** sama **padharman** yang ada di Bali sekarang. Siapakah yang di-**dharma**-kan di Antakunjarapada tidak kami ketahui.
11. **Samgat ser camalagi**, bila diuraikan satu persatu ialah: **samgat** merupakan akronim dari **sang pamgat**; **pamgat** terbentuk dari kata **pgat** artinya 'putus'. Di dalam prasasti Jawa Kuna **samgat** juga ditulis **samgét** (de Casparis, 1956: 220). **Sang pamgat** artinya 'sang pemutus'; **ser** artinya 'melalui kepala' **camalagi** berarti 'asam' (Goris, 1954a: 307 dan 231). Memperhatikan konteks kalimat prasasti menunjukkan suatu jabatan kerajaan, tetapi apa sesungguhnya tugas dari jabatan itu tidak jelas bagi kami.
12. Perkataan **kaḍaṇḍan** terbentuk dari **ḍaṇḍa** (bahasa Sanskerta) berarti '(peng)gada, denda, hukuman': **kaḍaṇḍan** artinya 'dihukum, didenda 'digada' (Mardiwarsito, 1981: 166). Dalam bahasa Bali terdapat perkataan **dandan** artinya 'menuntun'. Sawah **kaḍaṇḍan** mungkin sawah yang beberapa bagian dari hasilnya harus diserahkan untuk perbendaharaan kerajaan, mengingat pada bagian bawah prasasti disebut seorang pejabat bernama **sang admak ḍaṇḍa**.
13. **Kaswakan** terbentuk dari kata **swak** yang sekarang menjadi **subak**. Seperti kita ketahui sekarang di Bali **subak** merupakan pemerintahan air yang berwilayah tertentu (rata-rata 80 ha) berbatasan alam yang jelas seperti: desa, bukit, sungai, jalan dan lain-lainnya memiliki jaringan irigasi yang lengkap (Jelantik Sushila, 1979: 6). Mungkin yang dimaksudkan dengan **kaswakan** adalah wilayah yang mencakup satu persubakan.

14. **Lāga pariduh** yaitu **lāga** berarti 'perlombaan, uang taruhan' (Goris, 1954a: 265); **pariduh** terbentuk dari kata **riḍuh** mungkin sama dengan **ridu** artinya 'kacau' (Mardiwarsito, 1981: 475). Apakah tidak mungkin **lāga pariduh** merupakan semacam uang iuran yang dipergunakan untuk biaya menjaga keamanan?
15. **Cakṣu paracakṣu** mungkin semacam jabatan yang bertugas dalam bidang pengawasan. **Cakṣu** artinya 'mata'.
16. **Jatāka**, oleh Ginarsa diterjemahkan dengan 'wilayah tanah suci (laba pura) (Ginarsa, 1974: 29). Goris juga menjelaskan bahwa **jatāka** hampir sama dengan **laba pura** (Goris, 1957: 22).
17. Perkataan **bhaṭāra** (bahasa Sanskerta) mempunyai pengertian yang luas, misalnya berarti 'ketuhanan, hal kedewaan, dewa, gelar dewa termulia, raja, pembesar' (Mardiwarsito, 1981: 125). Perkataan **bhaṭāra** selain berarti 'raja' (masih hidup) juga untuk menyebutkan raja yang telah meninggal, misalnya Bhaṭāra Banu Wka adalah untuk menyebut Udayana (Goris, 1957: 20).
18. **Admak akmitan apigājih** merupakan jabatan kerajaan yang bertugas mengambil dan menjaga hak milik raja barangkali menerima upah (gaji) dari raja.
19. **Cetra** (sekarang di Bali disebut **sasih kēsanga**) jatuh pada hari-hari bulan Maret-April. **Sasih kēsanga** merupakan bulan terakhir dalam tahun Śaka dengan penutup hari **tilēm** (bulan mati). **Tilēm** pada **sasih kesanga** disebut **tilem kesanga**, pada waktu itu umat Hindu melakukan upacara **bhuta yadnya** (korban untuk **bhuta**). Ke esokan harinya jatuh pada hari pertama bagian bulan terang (**penanggal pisan**, bahasa Bali) adalah Nyepi ialah tahun baru Saka (Guweng, 1973: 20; Dinas Agama Hindu dan Budha, 1970: 48).
20. Teks prasasti ini sekarang disimpan pada Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Udayana.
21. Desa Bwahan terletak di sebelah barat Kdisan berlokasi di tepi danau Batur (Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli). Desa-desa yang terletak di tepi danau Batur itu sekarang disebut desa **bintang danu**, ini mungkin merupakan perubahan dari **wingkang raṇu**. Desa-desa lain yang termasuk desa **bintang danu** adalah: Songan, Trunyan dan Abang.

## KEPUSTAKAAN

Boechari

- 1977 "Candi dan Lingkungannya", dalam **Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia**, Jilid VII, No. 2, Juli, Bhratara, halaman 91-114
- 1977 "Epigrafi dan Sejarah Indonesia", dalam **Majalah Arkeologi**, Th. I., No. 2. Nopember, halaman 1-40.

Callenfels, Dr. P.V. van Stein.

- 1926 "Epigraphia Balica I", dalam **Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen**, LXVI, 3, G. Kolf & Co.

Casparis, J.G. de.

- 1956 "Selected Inscriptions from the 7th to the 9th century AD.", **Prasasti Indonesia II**, Masa Baru, Bandung.

Dinas Agama Hindu dan Budha Kabupaten Badung.

- 1970 **Hari Raya/Rerahinan Bagi Umat Hindu**, Denpasar.

Ekawana, I Gusti Putu.

- 1980 **Jaman Pemerintahan Raja Śri Bhaṭāra Mahaguru Dharmmottungā Warmmadewā di Bali**, (Skripsi), Denpasar.

Ginarsa, Ketut

- 1974 **Prasasti Baru Raja Ragajaya**, Lembaga Bahasa Nasional Cabang I, Singaraja.

Goris, Dr. R.

- 1948 **Sejarah Bali Kuna**, Singaraja.
- 1954 **Prasasti Bali I**, Masa Baru, Bandung.
- 1954a **Prasasti Bali II**, Masa Baru Bandung.
- 1957 "Dinasti Warmadewa di Pulau Bali", dalam **Bahasa dan Budaya**, Majalah Ilmiah Populer No. 3. Lembaga Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta.

Guweng, Ketut.

- 1973 "Wariga" dalam **Warta Hindu Dharma** No. 65, halaman 17-20.

Jelantik Sushila.

- 1979 **Masalah Pembinaan Subak**, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Bali, Denpasar.

Machi Suhadi.

- 1978 "References To Tax Systems in Old Javanese Inscriptions" dalam **Aspek-aspek Arkeologi Indonesia**, No. 6, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Departemen P & K, Jakarta.

Mardiwarsito, L.

1981 **Kamus Jawa Kuna - Indonesia, Nusa Indah, Ende.**

Purwita, Ida Bagus Pt.

1981 "Subak Dalam Lintasan Sejarah Bali" dalam **Widya Dharma**, Majalah Dwibulanan, No. 2 Tahun I/Oktober 1981, Denpasar, halaman 29 - 33.

Riboet Darmosoetopo.

1980 "Sedikit Uraian Tentang Pergantian Tahta" (Kerajaan Indonesia kuna dari abad 4 - 11 M), dalam **Seri Penerbitan Balai Arkeologi Yogyakarta**, Th. I No. 1 Maret, Yogyakarta, halaman 52 - 57.

Sukarto K. Atmodjo, M.M.

1970 "Preliminary Report On the Copper-Plate Inscription Of Asah Duren" dalam **Bijdragen Tot De Taal En Volkenkunde**, Deel 126, 2e Aflevering, 'S-Gravenhage-Martinus Nijhoff, halaman 215-227.

1974 **The Charter Of Kapal**, dibawakan dalam Sixth International Conference On Asian History International Association Of Historians Of Asia, Yogyakarta.

1981 **Metode Penelitian Dan Analisa Sumber-Sumber Epigrafi**, dibawakan dalam Rapat Evaluasi Metode Penelitian Arkeologi, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Yogyakarta.